

PESISIR SELATAN



**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Maka untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem dimaksud adalah **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah** atau sering disingkat dengan SPIP.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah. Disamping itu terdapat Sistem lainnya adalah Sistem pengendalian Ekstern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/ Sedangkan Sistem Pengendalian Ekstern pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR/DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga peradilan lainnya

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah *Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.*"

Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

SPIP hendaknya dilaksanakan oleh organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah. Keandalan penyajian suatu laporan keuangan pemerintah dapat terwujud dengan menyelenggarakan SPIP dengan baik misalnya dengan menerapkan prosedur rekonsiliasi antara dua data transaksi keuangan yang dibuat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dengan yang dibuat oleh Bendahara Umum Negara ataupun daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tersebut mengacu pada Konsep dari Committee of 2 Sponsoring Organizations (COSO) dalam mengatur kewajiban penyelenggaraan Pengendalian Internal.

SPIP diartikan sebagai proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu :

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Penanaman asset Negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Salah satu komponen penting dari unsur lingkungan pengendalian yang wajib ada dan harus dipelihara sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif adalah dengan adanya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif. Wujud nyata dari peran APIP yang efektif yaitu dengan adanya dukungan dari APIP tersebut bahwa instansi pemerintah dapat melaksanakan kegiatan dengan mengutamakan asas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas. APIP juga harus berperan nyata yaitu dengan mengingatkan dan memberikan peringatan dini apabila ada risiko yang sekiranya dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan kegiatan suatu instansi pemerintah serta dapat meningkatkan dan memelihara kualitas tata

kelola fungsi dari instansi pemerintah tersebut terutama berkaitan dalam hal perwujudan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Terwujudnya transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu tolok ukur keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik dimana masyarakat meyakini bahwa pemerintah dapat mempertanggungjawabkan seluruh dana yang dipercayakan kepada mereka sehingga berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penerapan SPIP dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat sehingga diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

II. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

III. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada serta mengkomunikasikan dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir selatan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Menjadi dasar dalam membangun dan mengimplementasi pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP.
3. Menjadi dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP, serta dasar pemantauan yang berkelanjutan.

IV. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

SEKILAS TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

A. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

SPI dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

C. Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan. Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;

- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. *Penilaian Risiko*

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

3. *Aktivitas Pengendalian*

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian

yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan.

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat ditindaklanjuti.

Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang

diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan pengendalian telah dijalankan.

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif;
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan; Seluruh lingkup Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan (4 bidang dan 1 Sekretariat) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh bidang dan sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 1:
Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan,

diperoleh gambaran yang tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 2:Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukan masih adanya kelemahan

lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Menyusun kode etik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
III	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi SOTK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan)

		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
V	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai Memberikan prioritas pengembangan SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan
VI	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
VII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat

	Pemerintah Terkait	Koordinasi antar SKPD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
--	--------------------	--

BAB IV

RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2021, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Repormasi Bkirokrasi Dengan Aparatur Yang bersih dan Responsif Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga berencana lestari
2. Meningkatkan Peran Struktur sosial Dalam rangka mengurangi tindak kejahatan, Kriminalitas dan peredaran obat obatan terlarang dengan tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Nagari

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Risiko atas pencapaian tujuan 1:

- Kurang optimalnya Media Komunikasi dan Edukasi.

Risiko atas pencapaian tujuan 2:

- Kurangnya Pasangan Usia Subur ber- KB

Risiko Pencapaian Tujuan 3:

- Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan operasional balai penyuluh KB, Kelompok kelompok KB dan Institusi KB

Risiko atas pencapaian tujuan 4:

- Kurang optimalnya pergerakan Kampung KB

Risiko atas pencapaian tujuan 5:

- Akan berdampak kurangnya keluarga yang berkualitas

Risiko Pencapaian Tujuan 6:

- Kurang optimalnya pembinaan kawasan perdesaan

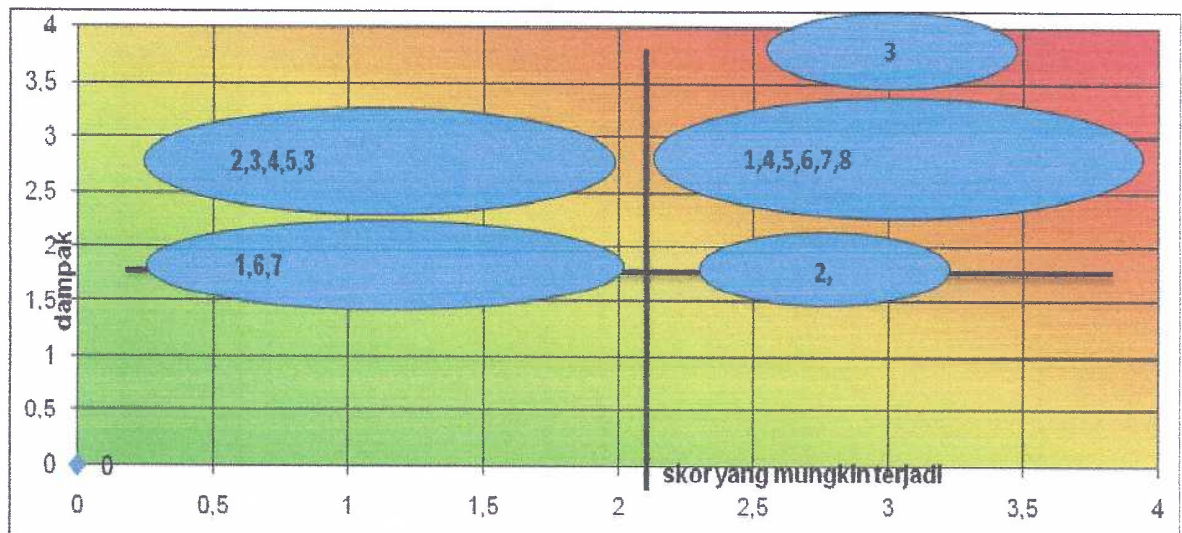
Risiko atas pencapaian tujuan 7:

- Kurang optimalnya pelayanan Pemerintahan Nagari

Risiko atas Pencapaian Tujuan 8:

- Akan berdampak pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Nagari serta KAN

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :



Keterangan:

Tingkat I : Level risiko sangat rendah

Tingkat II : Level risiko rendah

Tingkat III : Level risiko tinggi

Tingkat IV : Level risiko sangat tinggi

Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah

dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Lokal
 1. Pelaksanaan pengadaan media media informasi berupa pengadaan media informasi dalam ruangan dan luar ruangan
- b. Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pelayanan MKJ (MOP, MOW, IUD dan Implant) di Kabupaten Pesisir Selatan
 2. Koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat
- c. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 1. Koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB
- d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB
 1. Koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB
 2. Pembinaan dan monitoring kelembagaan KB
 3. Pelaksanaan pembinaan Kader Kader KB dan monitoringnya
 4. Pembinaan Kampung KB
- e. Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 1. Pelaksanaan pergerakan UPPKS dan PIK- R
- f. Fasilitasi Kerja Sama Antar Nagari
 1. Pembinaan Kawasan dan KAN
 2. Pembinaan mahasiswa KKN

- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan
1. Sosialisasi pembinaan dan Monitoring keuangan 182 Nagari serta penambahan SDM
 2. Sosialisasi regulasi Nagari
 3. Pembinaan APB-Nagari
 4. Penyelesaian komplik Nagari
 5. Pemilihan Wali Nagari dan Bamus Nagari
 6. Penetapan Tapal Batas Nagari
 7. Penyediaan BPJS Perangkat Nagari
- h. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat yang masyarakat pelaku hukum adat yang sama dalam daerah Kab/Kota
1. Pelatihan, sosialisasi, bimtek, monitoring dan evaluasi dan studi implementasi
 2. Sosialisasi regulasi Tentang Desa, Rakor Camat dan Pendamping Desa dan penyusunan RPJM Nagari yang Walinagari Baru dilantik dan RKP Nagari
 3. Koordinasi dan Rapat rapat dengan Nagari, Penyusunan IDM dan Profil Nagari
 4. Data data dalam menyusun IDM dan Profil Nagari
 5. Pembinaan KAN

D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

1. Supervisi/pembinaan OPD
2. Koordinasi dengan OPD terkait
3. Penyediaan KIE
4. Peningkatan kegiatan-kegiatan pelibatan masyarakat
5. Juknis Kegiatan dan Regulasi pemerintahan Nagari
6. Pelayanan KB
7. SOP pengadaan, Evaluasi Renja dan Renstra

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 3.

BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

berikut :

- i. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Lokal
2. Pelaksanaan pengadaan media media informasi berupa pengadaan media informasi dalam ruangan dan luar ruangan
- j. Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 3. Pelayanan MKJ (MOP, MOW, IUD dan Implant) di Kabupaten Pesisir Selatan
 4. Koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat
- k. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 2. Koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB
- i. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB
 1. Koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB

2. Pembinaan dan monitoring kelembagaan KB
 3. Pelaksanaan pembinaan Kader KB dan monitoringnya
 4. Pembinaan Kampung KB
- m. Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
1. Pelaksanaan pergerakan UPPKS dan PIK- R
- n. Fasilitasi Kerja Sama Antar Nagari
1. Pembinaan Kawasan dan KAN
 2. Pembinaan mahasiswa KKN
- o. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan
1. Sosialisasi pembinaan dan Monitoring keuangan 182 Nagari serta penambahan SDM
 2. Sosialisasi regulasi Nagari
 3. Pembinaan APB-Nagari
 4. Penyelesaian konflik Nagari
 5. Pemilihan Wali Nagari dan Bamus Nagari
 6. Penetapan Tapal Batas Nagari
 7. Penyediaan BPJS Perangkat Nagari
- p. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat yang masyarakat pelaku hukum adat yang sama dalam daerah Kab/Kota
1. Pelatihan, sosialisasi, bimtek, monitoring dan evaluasi dan studi implementasi
 2. Sosialisasi regulasi Tentang Desa, Rakor Camat dan Pendamping Desa dan penyusunan RPJM Nagari yang Walinagari Baru dilantik dan RKP Nagari
 3. Koordinasi dan Rapat rapat dengan Nagari, Penyusunan IDM dan Profil Nagari

4. Data data dalam menyusun IDM dan Profil Nagari
5. Pembinaan KAN

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- Penyediaan media KIE, Pembinaan dan monitoring dan evaluasi terhadap media KIE tersebut
- Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.

Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang pada lampiran 5

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan selaku auditor Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari seluruh kegiatan SKPD Kabupaten Pesisir Selatan atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/revisi dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Painan, 15 Maret 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Lampiran 1. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Lingkungan Pengendalian

No	Risiko	Rencana Tindakan Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		target waktu
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Melekat (Pimpinan OPD)	Evaluasi Terpisah (Inspektorat)	
RTP ATAS RISIKO PENCAHAIAN TUJUAN ' Terwujudnya Keluarga Berencana Lestari'								
1.	Kurang optimalnya media komunikasi dan edukasi	Penyediaan Media komunikasi dalam dan luar ruangan, pembinaan BKB, BKL, BKR, UPPKS	Kadis/PA, KPA, PPTK, dan eselon III intern	1. Informasi Kesehatan Produksi 2. Informasi ketersediaan SDM	dokumen BKB, BKL, BKR, UPPKS.	Per triwulan	Per semester	2021
2.	Kurangnya Pasangan Usia Subur Ber-KB	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bekerjasama dengan mitra terkait (IBI, TNI, PKK)	Kadis/PA, KPA, PPTK, dan eselon III intern	Informasi Pelaksanaan Pelayanan	Surat pelaksanaan pelayanan	Per triwulan	Per semester	2021
3.	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana.	Tersedianya sarana prasarana program KKBPK	KPA, PPTK, Instansi terkait, Eselon III intern dan Tim verifikasi	1. Informasi harga Sarana prasarana yang diadakan 2. Informasi spesifikasi pengadaan Sarana prasarana	1. Ceklist Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2. Dokumen kontrak	Per triwulan	Per semester	2021

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Informasi		Pemantauan		target waktu
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Melekat (Pimpinan OPD)	Evaluasi Terpisah (Inspektorat)	
4.	Kurang optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Pergerakan Kampung KB	Melakukan pembinaan terhadap Penyuluh Lapangan KB	Kadis/PA, KPA dan PPTK	1. mengadakan Penyuluhan KB setiap Bulannya 2. Pembinaan Penyuluh KB	Rakor membahas tentang target yang harus di capai pada tahun bersangkutan	Per triwulan	Per semester	2021
5.	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Melakukan pembinaan terhadap kampung KB dan Penyuluh Lapangan KB	Kadis/PA, KPA dan PPTK	1. mengadakan monitoring dan Pembinaan 2. Mengadakan Persiapan Rumah Data	Rakor membahas tentang Pembinaan Kampung KB	Per triwulan	Per semester	2021
RTP ATAS RISIKO PENCAPAIAN TUJUAN " Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nagari "								
6	Kurang optimalnya Pembinaan Kawasan Perdesaan	Mengadakan rapat rapat koordinasi dengan pelaku kawasan perdesaan	Kadis/PA, KPA, Kasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kabid SDA, UEM dan PKP dan PPTK dan instansi terkait	1. Petunjuk operasional penyelenggaraan Kawasan Perdesaan 2. Informasi syarat syarat sebuah kawasan	1. regulasi tentang pembentukan kawasan perdesaan 2. Pengintegrasikan beberapa nagari untuk di jadikan satu kawasan	Per triwulan	Per semester	2021

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		target waktu
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Melekat (Pimpinan OPD)	Evaluasi Terpisah (Inspektorat)	
7	Kurang optimal pelaksanaan pemerintahan Nagari	Meningkatkan SDM nagari dengan mengadakan pelatihan aparatur nagari dan monitoring tata pemerintahan nagari	Kadis/PA, KPA dan PPTK dan instansi terkait	1. Petunjuk operasional penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	1. regulasi tentang pemerintahan nagari	Per triwulan	Per semester	2021
8	Akan berdampak proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Nagari serta KAN	Berdayanya lembaga TP PKK Kabupaten dengan jalan pembinaan PKK Kecamatan, Dasa wisma, posyandu, HKG PKK, UP2K, Konsultan Pendamping Desa dan KAN	Kadis/PA, KPA, dan Kabid Kelembagaan	1. Petunjuk operasional perencanaan Pemerintahan Nagari 2. Pembinaan kelembagaan masyarakat	1. regulasi tentang perencanaan pemerintahan nagari 2. Regulasi tentang kelembagaan masyarakat	Per triwulan	Per semester	2021

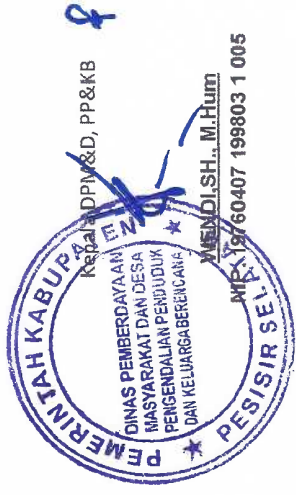


DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI

SKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya KIE Pengendalian Penduduk dan KB.	Kurang optimalnya media komunikasi dan edukasi	BKKBN, Bidang PP dan KB, PKB/PLKB	Kurangnya sosialisasi tentang program KB	terhambatnya proses pelayanan KB dan menurunnya Pelayanan KB
2	Terwujudnya pendayagunaan tenaga Penyuluh KB, Kelompok-kelompok KB dan Institusi Institusi KB	Kurangnya Pasangan Usia Subur Ber-KB	BKKBN, Bidang PP dan KB	Kurangnya tenaga Penyuluh KB yang handal di lapangan	Berkurangnya capaian peserta KB aktif
3	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bekerjasama dengan mitra terkait (IBI, TNI, PKK)	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana.	BKKBN, Bidang PP dan KB, PLKB/PKB	terlambatnya petunjuk operasional Dana BOKB	Terlambatnya proses pengadaan sarana dan prasarana program KBPK
4	Terlaksananya penggerakan kampung KB	Kurang optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Pergerakan Kampung KB	BKKBN, Bidang KB PP dan KB, OLKB/PKB,	Kurangnya pergerakan kader dan Kampung KB	Terlambatnya proses pembangunan dikampung KB
5	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	akan berdampak kurangnya keluarga yang berkualitas	BKKBN, Bidang PP dan KB, PKB/PLKB	Anggaran dan SDM	berkurangnya keluarga yang berkualitas
6	Terwujudnya kerjasama Antar Desa dan Kawasan Perdesaan	Kurang Optimalnya pembinaan kawasan perdesaan	Bidang Sumber Daya Alam, UEM dan PKP	Kurangnya sosialisasi tentang kawasan perdesaan	Terhambatnya pembentukan kawasan perdesaan dan kerjasama antar nagari
7	Terlaksananya pelaksanaan pemerintahan nagari	Kurang optimalnya pelayanan pemerintahan nagari	Bidang Pemerintahan Nagari	Terlambatnya regulasi-regulasi tentang pengelolaan pemerintahan nagari	Terhambatnya proses pelayanan pemerintahan nagari

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5	6
8	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari	akan berdampak pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di nagari serta KAN	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dan Sosbud	SDM	berkurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari serta kurangnya pembinaan KAN



RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan/rencana tindak perbaikan kegiatan			Penanggung Jawab pelaksanaan perbaikan	Target waktu pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	
1	Terlaksananya KIE Pengendalian Penduduk dan KB.	Kurang optimalnya media komunikasi dan edukasi	tersedianya anggaran dan SDM	Penyediaan media edukasi, Monitoring dan Evaluasi	Bidang PP & KB	Feb - Des 2021	
2	Terwujudnya pendayagunaan tenaga Penyuluh KB, Kelompok-kelompok KB dan Institusi Institusi KB	Kurangnya Pasangan Usia Subur Ber-KB	tersedianya petunjuk operasional sebelum tahun pelaksanaan kegiatan	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Bidang PP & KB	Mei - Oktober 2021	
3	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bekerjasama dengan mitra terkait (IBI, TNI,PKK)	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana.	Tersedianya alat/obat kontrasepsi dan side effect di Dinas PMDPP&KB Kab. Pessel	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	Bidang PP & KB	Februari - Desember 2021	
4	Terlaksananya pergerakan kampung KB	Kurang optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Pergerakan Kampung KB	ketersediaan petunjuk operasional sebelum tahun pelaksanaan kegiatan	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	Bidang PP & KB	satu tahun	
5	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	akan berdampak kurangnya keluarga yang berkeualitas	ketersediaan petunjuk operasional sebelum tahun pelaksanaan kegiatan	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	Bidang PP & KB	1 tahun	
6	Terwujudnya kerjasama Antar Desa dan Kawasan Perdesaan	Kurang Optimalnya pembinaan kawasan perdesaan	ketersediaan petunjuk operasional sebelum tahun pelaksanaan kegiatan	koordinasi dengan DPMD Propinsi dan Kecamatan	Bidang Pemberdayaan SDA, UEM dan PKP	1 tahun	
7	Terlaksananya pelayanan pemerintahan nagari	Terlaksananya pelaksanaan pemerintahan nagari	ketersediaan petunjuk operasional sebelum tahun pelaksanaan kegiatan	koordinasi dengan DPMD Propinsi dan Kecamatan	Bidang Pemerintahan Nagari	1 tahun	

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan/rencana tindak perbaikan kegiatan			Penanggung Jawab pelaksanaan perbaikan	Target waktu pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	
No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan/rencana tindak perbaikan kegiatan			Penanggung Jawab pelaksanaan perbaikan	Target waktu pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	
8	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari	akan berdampak pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di nagari serta KAN	ketersediaan petunjuk operasional sebelum tahun pelaksanaan kegiatan	koordinasi dengan DPMD Provinsi Sumatera Barat , Koordinasi dengan konsultan Desa dan Regulasi Perencanaan	Bidang pemberdayaan Kelembagaan partisipasi masyarakat dan Sosbud	1 tahun	



RENCANA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGENDALIAN

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian Yg Dircanakan	Media/Bentuk/ Sarana/ Pengomunikasikan	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Terlaksananya KIE Pengendalian Penduduk dan KB.	Penyediaan media edukasi, Monitoring dan Evaluasi	Surat edaran, Papan Informasi, Purnaflet	Bidang PP & KB	PKB/PLKB, Kader Poktan, masyarakat	Feb - Des 2021
2	Terwujudnya pendayagunaan tenaga Penyuluh KB, Kelompok-kelompok KB dan Institusi Institusi KB	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat	pertemuan sinkronisasi dan harmonisasi DAK fisik dan BOKB	Bidang PP & KB	BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Mei - Oktober 2021
3	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bekerjasama dengan mitra terkait (IBI, TNI, PKK)	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	surat permintaan alat/obat kontrasepsi dan side effect pelayanan KB	Bidang PP & KB	BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Februari - Desember 2021
4	Terlaksananya pergerakan kampung KB	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	pertemuan sinkronisasi dan harmonisasi pertemuan koordinasi pelaksanaan DAK bidang KB	Bidang PP & KB	BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat	satu tahun
5	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	pertemuan sinkronisasi dan harmonisasi pertemuan koordinasi pelaksanaan DAK bidang KB	Bidang PP & KB	BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat	1 tahun
6	Terwujudnya kerjasama Antar Desa dan Kawasan Perdesaan	koordinasi dengan DPMD Propinsi dan Kecamatan	pertemuan dan koordinasi dengan UPK, BKAN dan Kawasan	Bidang Pemberdayaan SDA, UEM dan PKP	Kawasan Perdesaan, UPK dan BKAN dan Masyarakat	1 tahun
7	Terlaksananya pelaksanaan pemerintahan nagari	koordinasi dengan DPMD Propinsi dan Kecamatan	Rapat Koordinasi, Pertemuan dan sosialisasi	Bidang Pemerintahan Nagari	Pemerintahan Nagari	1 tahun

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian Yg Direncanakan	Bentuk/ Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
8	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari	koordinasi dengan DPMD Propinsi dan Kecamatan	Rapat Koordinasi, Pertemuan dan sosialisasi	Bidang pemberdayaan Kelembagaan partisipasi masyarakat dan Sosbud	Pemerintahan Nagari dan Kelompok Masyarakat	1 tahun



RANCANGAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PENGENDALIAN

SKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian Yang Direncanakan	Pemantauan yang akan digunakan		
			Metode Pemantauan	Dilakukan Oleh	Waktu
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya KIE Pengendalian Penduduk dan KB.	Penyediaan media edukasi, Monitoring dan Evaluasi	Penyediaan media KIE, Pembinaan, monitoring dan evaluasi	Penyediaan media edukasi, Monitoring dan Evaluasi	Feb - Des 2021
2	Terwujudnya pendayagunaan tenaga Penyuluh KB, Kelompok-kelompok KB dan Institusi Institusi KB	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat	pengumpulan informasi online melalui web sakura BKKBN Pusat	Tim SIGA dan DPMDPP&KB	Mei - Oktober 2021
3	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bekerjasama dengan mitra terkait (IBI, TNI, PKK)	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	komunikasi berkelanjutan dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat serta pengiriman data peserta KB aktif dan PUS yang <i>Unmet Need</i>	Tim anggaran DPMDPP&KB	Februari - Desember 2021
4	Terlaksananya pergerakan kampung KB	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	pengumpulan informasi online melalui web sakura BKKBN Pusat	Tim anggaran DPMDPP&KB	satu tahun
5	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	Pembinaan, monitoring dan evaluasi	Tim anggaran DPMDPP&KB	1 tahun
6	Terwujudnya kerjasama Antar Desa dan Kawasan Perdesaan	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk	Pembinaan, monitoring dan evaluasi	Tim anggaran DPMDPP&KB	1 tahun
7	Terlaksananya pelaksanaan pemerintahan nagari	koordinasi dengan DPMD Propinsi dan Kecamatan	Pembinaan, monitoring dan evaluasi	Tim anggaran DPMDPP&KB	1 tahun

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian Yang Direncanakan	Pemantauan yang akan digunakan		
			Metode Pemantauan	Dilakukan Oleh	Waktu
			4	5	6
1	8 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari	3 koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	pengumpulan informasi , Pembinaan dan evaluasi	Tim anggaran DPMDPPP&KB	1 tahun



Identifikasi Tujuan Strategis

Visi : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEIAHTERA"

No	Misi	Tujuan		Sasaran	Kegiatan yang mendukung tujuan/tujuan/sasaran
		3	4		
1	1	"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEIAHTERA"	Terwujudnya Keluarga Berencana Lestari	Menurunnya Angka Kelahiran	5 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Local Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Nagari	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Nagari		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
			Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Nagari		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab.Kota

Catatan:

Uraian Visi berisi visi unit organisasi di baris atas kolom

- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan dokumen Renstra
- Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan dokumen renstra
- Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang selaras dengan dokumen renstra
- Kolom 5 berisi uraian tentang kegiatan yang mendukung capaian tujuan strategis



Control Self Assessment (CSA)

Identifikasi Kegiatan & Tujuan Kegiatan

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Keselarsan dengan tujuan/sasaran strategis	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Local	Terlaksananya KIE Pengendalian Penduduk dan KB.	selaras	
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terwujudnya pendayagunaan tenaga Penyuluh KB, Kelompok-kelompok KB dan Institusi Institusi KB	selaras	
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bekerjasama dengan mitra terkait (IBI, TNI, PKK)	selaras	
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya pergerakan kampung KB	selaras	
5	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	selaras	
6	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Terwujudnya kerjasama Antar Desa dan Kawasan Perdesaan	selaras	
7	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya pelayanan pemerintahan nagari	selaras	

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Keselaran dengan tujuan/sasaran strategis	Keterangan
1	2	3	4	5
8	Pemberdayaan Lembaga Masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adta yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab.Kota	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari	selaras	

Catatan:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan atas kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
4. Kolom 4 berisi uraian tentang keselarasan tujuan kegiatan dengan tujuan/sasaran diatasnya (strategis)



IDENTIFIKASI RISIKO

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

SKPD SKPD:

No	Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan	Skor Kemungkinan terjadi	Skor Dampak	Total Skor (7x8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Local	Terlaksananya KIE Pengendalian Penduduk dan KB.	Kurang optimalnya media komunikasi dan edukasi	BKKBN, Bidang PP dan KB, PKB/PLKB	Kurangnya sosialisasi tentang program program KB	terhambatnya proses pelayanan KB dan menurunnya Pelayanan KB			
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terwujudnya pendayagunaan tenaga Penyuluh KB, kelompok-kelompok KB dan Institusi Institusi KB	Kurangnya Pasangan Usia Subur Ber-KB	BKKBN, Bidang PP dan KB	Kurangnya tenaga Penyuluh KB yang handal di lapangan	Berkurangnya capaian peserta KB aktif	3,00	2,00	5,00
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bekerjasama dengan mitra terkait (IBI, TNI, PKK)	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana.	BKKBN, Bidang PP dan KB, PLKB/PKB	Terhambatnya petunjuk operasional Dana BOKB	Terlambatnya proses pengadaan sarana dan prasarana program KBPK	3,00	2,00	5,00
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya penggerakan kampung KB	Kurang optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Pergerakan Kampung KB	BKKBN, Bidang KB PP dan KB, OLKB/PKB,	Kurangnya pergerakan kader dan Kampung KB	Terlambatnya proses pembangunan dikampung KB	4,00	3,00	7,00
5	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	akan berdampak kurangnya keluarga yang berkualitas	BKKBN, Bidang PP dan KB, PKB/PLKB	Anggaran dan SDM	berkurangnya keluarga yang berkualitas	3,00	2,00	5,00
6	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Terwujudnya kerjasama Antar Desa dan Kawasan Perdesaan	Kurang Optimalnya pembinaan kawasan perdesaan	Bidang Sumber Daya Alam, UEM dan PKP	Kurangnya sosialisasi tentang kawasan perdesaan	Terhambatnya pembentukan kawasan perdesaan dan kerjasama antar nagari	3,00	3,00	6,00
7	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya pelaksanaan pemerintahan nagari	Kurang optimalnya pelayanan pemerintahan nagari	Bidang Pemerintahan Nagari	Terhambatnya regulasi-regulasi tentang pengelolaan pemerintahan nagari	Terhambatnya proses pelayanan pemerintahan nagari	3,00	2,00	5,00

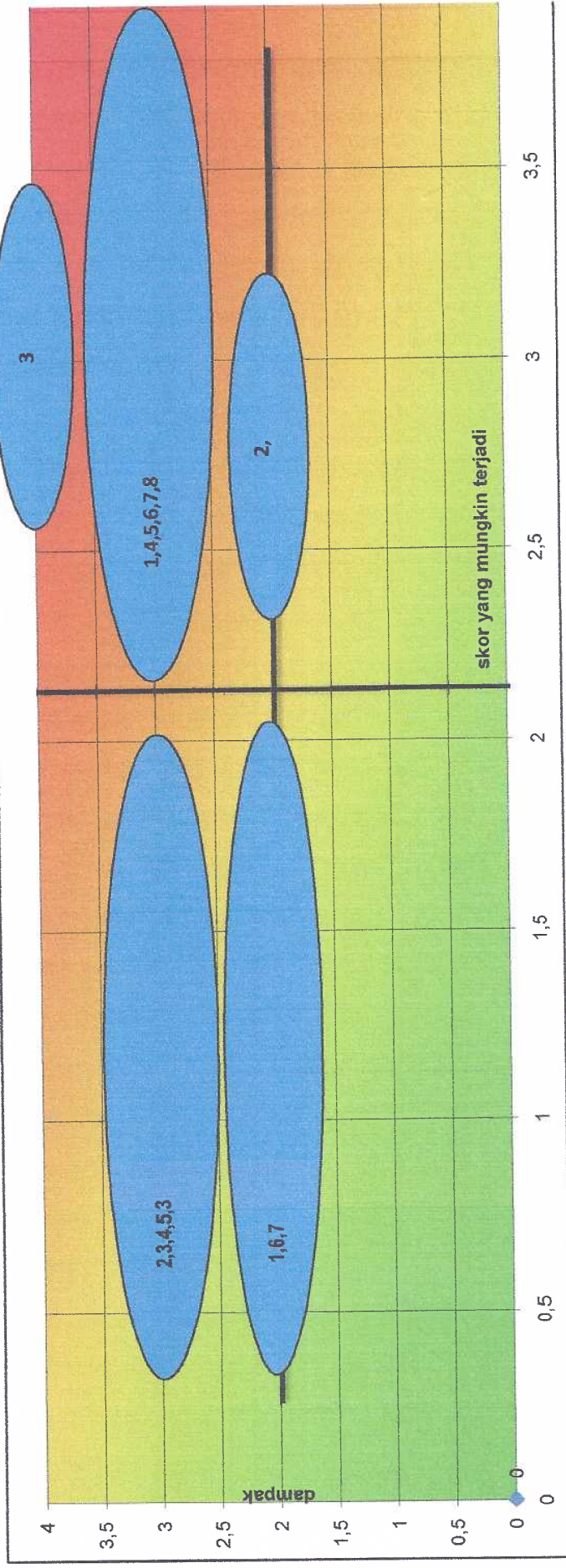
No	Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan	Skor Kemungkinan terjadi	Skor Dampak	Total Skor (7x8)						
1		2	3	4	5	6	7	8	9						
No	Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan	Skor Kemungkinan terjadi	Skor Dampak	Total Skor (7x8)						
1	8	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adta yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab.Kota	2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari	3	akan berdampak pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di nagari serta KAN	4	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dan Sosbud	SDM	5	berkurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari sderta kurangnya pembinaan KAN	6	3,00	2,00	5,00

Ket:

- Kolom 1 berisi no urut
- Kolom 2 berisi uraian tujuan yang diidentifikasi
- Kolom 3 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
- Kolom 4 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menanggapi risiko tersebut
- Kolom 5 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko (fasilitator agar mengarahkan peserta diskusi untuk mengaitkan risiko dengan lingkungan pengendalian)
- Kolom 6 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi



PETA RISIKO



Keterangan:

Tingkat I : Level risiko sangat rendah

Tingkat II : Level risiko rendah

Tingkat III : Level risiko tinggi

Tingkat IV : Level risiko sangat tinggi



RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terlaksananya KIE Pengendalian Penduduk dan KB.	Kurang optimalnya media komunikasi dan edukasi	tersedianya anggaran dan SDM	mengalokasikan dana di RKA	Kurang Efektif	Penyediaan media edukasi, Monitoring dan Evaluasi	Bidang PP & KB	Feb - Des 2021
2	Terwujudnya pendayagunaan tenaga Penyuluh KB, Kelompok-kelompok KB dan Institusi KB	Kurangnya Pasangan Usia Subur Ber-KB	tersedianya petunjuk operasional sebelum tahun pelaksanaan kegiatan	penggunaan petunjuk operasional tahun sebelumnya	Kurang Efektif	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Bidang PP & KB	Mei - Oktober 2021
3	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bekerjasama dengan mitra terkait (IBI, TNI, PKK)	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana.	Tersedianya alat/obat kontrasepsi dan side effect di Dinas PMDPP&KB Kab.Pessel	berkoordinasi dengan FKTP untuk penggunaan sementara obat di gudang FKTP	Kurang Efektif	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	Bidang PP & KB	Februari - Desember 2021
4	Terlaksananya pergerakan kampung KB	Kurang optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Pergerakan Kampung KB	ketersediaan petunjuk operasional sebelum tahun pelaksanaan kegiatan	penggunaan petunjuk operasional tahun sebelumnya	Kurang Efektif	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	Bidang PP & KB	satu tahun
5	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	akan berdampak kurangnya keluarga yang berkualitas	ketersediaan petunjuk operasional sebelum tahun pelaksanaan kegiatan	penggunaan petunjuk operasional tahun sebelumnya	Kurang Efektif	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	Bidang PP & KB	1 tahun

DAFTAR RANCANGAN PEMANTAUAN

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Uraian Pengendalian	Metode Pemantauan yang ada	Pemantauan yang akan digunakan			Tindakan Korektif Yang Diperlukan
				Metode Pemantauan	Dilakukan Oleh	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	diambil dari Kolom 2 (tujuan yang diidentifikasi) sheet 7. infokom	isikan sesuai dengan pengendalian yang masih dibutuhkan (Kolom 7) dalam sheet 6. Keg pengendalian	Sudah ada / belum oleh atasan langsung/APIP/teman khusus	Pilih : Pemantauan berkelanjutan / Evaluasi Terpisah / Pemantauan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan revaluasi lainnya	untuk pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung; untuk Evaluasi Terpisah (dan/atau) Pemantauan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan revaluasi lainnya oleh APIP (Inspektoral/ BPK/ BPKP)		dapat diisi setelah dilakukan pemantauan, apabila masih terdapat kelemahan atau kekurangan dari kegiatan pengendalian terpantau
1	Terlaksananya KIE Pengendalian Penduduk dan KB.	Penyediaan media edukasi, Monitoring dan Evaluasi	sudah ada	Penyediaan media KIE, Pembinaan, monitoring dan evaluasi	Penyediaan media edukasi, Monitoring dan Evaluasi	Feb - Des 2021	pengajuan penyediaan dana alat/obat pelayanan kontrasepsi dari APBD,serta bagi PUS unmet need diinjurkan untuk kontak
2	Terwujudnya pendayagunaan tenaga Penyuluh KB, kelompok-kelompok KB dan Institusi KB	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat	sudah ada	pengumpulan informasi online melalui web sakura BKKBN Pusat	Tim SIGA dan DPM DPP&KB	Mei - Oktober 2021	pengajuan usulan pengadaan DAK fisik melalui e planning
3	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bekerjasama dengan mitra terkait (IBI, TNI, PKK)	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	sudah ada	komunikasi berkelanjutan dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat serta pengiriman data peserta KB aktif dan PUS	Tim anggaran DPM DPP&KB	Februari - Desember 2021	pengajuan penyediaan dana alat/obat pelayanan kontrasepsi dari APBD,serta bagi PUS unmet need diinjurkan untuk kontak
4	Terlaksananya pergerakan kampung KB	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	sudah ada	pengumpulan informasi online melalui web sakura BKKBN Pusat	Tim anggaran DPM DPP&KB	satu tahun	Pembinaan dan Penyediaan Anggaran
5	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	sudah ada	Pembinaan, monitoring dan evaluasi	Tim anggaran DPM DPP&KB	1 tahun	Pembinaan dan Penyediaan Anggaran

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Uraian Pengendalian	Metode Pemantauan yang ada	Pemantauan yang akan digunakan			Tindakan Korektif Yang Diperlukan
				Metode Pemantauan	Dilakukan Oleh	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	diambil dari Kolom 2 (tujuan yang diidentifikasi) sheet 7. Infokom	isikan sesuai dengan pengendalian yang masih dibutuhkan (Kolom 7) dalam sheet 6. Keg pengendalian	Sudah ada / belum oleh atasan langsung/APIP/tim khusus	Pilih : Pemantauan berkelanjutan / Evaluasi Terpisah / Pemantauan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya	untuk pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung; untuk Evaluasi Terpisah dan (atau) Pemantauan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya oleh APIP (Inspektorat/ BPK/ BPKP)		dapat diisi setelah dilakukan pemantauan, apabila masih terdapat kelemahan atau kekurangan dari kegiatan pengendalian terpantau
6	Terwujudnya kerjasama Antar Desa dan Kawasan Perdesaan	koordinasi dengan DPMD Propinsi dan Kecamatan	sudah ada	Pembinaan, monitoring dan evaluasi	Tim anggaran DPMDPP&KB	1 tahun	Pembinaan dan Penyediaan Anggaran
7	Terlaksanannya pelaksanaan pemerintahan nagari	koordinasi dengan DPMD Propinsi dan Kecamatan	sudah ada	Pembinaan, monitoring dan evaluasi	Tim anggaran DPMDPP&KB	1 tahun	Pembinaan dan Penyediaan Anggaran
8	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	sudah ada	pengumpulan informasi, Pembinaan dan evaluasi	Tim anggaran DPMDPP&KB	1 tahun	Pembinaan dan Penyediaan Anggaran

Keterangan :

1. Kolom 1 Diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 Diisi sesuai Pengendalian yang mengalami penyempurnaan
3. Kolom 3 Cukup jelas
4. Kolom 4 Diisi dengan Atasan/Tim Khusus/APIP
5. Kolom 5 Diisi dengan Pihak/Pejabat yang bertanggungjawab melakukan pemantauan
6. Kolom 6 Cukup jelas
7. Kolom 7 Tindakan yang diperlukan apabila diperlukan penyempurnaan lebih lanjut

